

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Roidwan Elang Sudrajat¹ Susanti² Lia Uzliawati³

^{1, 2, 3} Program Studi Magister Akuntansi; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: roidwan.sudrajat1999@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efek dari koneksi politik dan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terhadap kualitas laporan keuangan, yang diukur menggunakan discretionary accrual (DAC). Data sekunder yang diperoleh dari studi literatur digunakan dalam penelitian ini, dan pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki dampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara pengungkapan CSR memiliki dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Semakin kuat koneksi politik dalam suatu perusahaan, maka kemungkinan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menurun karena adanya konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Di sisi lain, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik, terutama para investor.

ABSTRACT

This study aims to investigate the effects of political connections and disclosure of Corporate social responsibility (CSR) on the quality of financial reports, which are measured using discretionary accruals (DAC). Secondary data obtained from literature studies were used in this study, and the approach used was a qualitative descriptive method. The results show that political connections have a negative impact on the quality of financial reporting, while CSR disclosure has a positive impact on the quality of financial reporting. The stronger the political connections within a company, the more likely the quality of the resulting financial reports will decrease due to conflicts of interest that may occur. On the other hand, the higher the level of CSR disclosure in a company, the better the quality of the financial reports produced, which in turn can increase public trust, especially investors

Artikel History:

Artikel masuk: 09/06/2023

Artikel revisi: 11/06/2023

Artikel diterima:

12/06/2023

Keywords:

*Kualitas Laporan Keuangan,
Koneksi Politik dan Corporate
Social Responsibility*



PENDAHULUAN

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2018), laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dapat diverifikasi, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan disampaikan dengan cepat kepada pengguna laporan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Tanggung jawab manajemen adalah menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan proses pencatatan transaksi bisnis dan penggunaan sumber daya perusahaan. Laporan keuangan juga harus memenuhi karakteristik kualitatif fundamental dan meningkatkan kualitasnya.

PSAK No. 1 mengatur komponen-komponen yang harus disajikan dalam laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Investor, calon investor, kreditur, dan kreditur potensial merupakan pengguna utama laporan keuangan, yang menggunakan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, seperti koneksi politik, *corporate social responsibility* perusahaan, tata kelola perusahaan, kualitas audit internal, pengendalian internal, struktur kepemilikan, profitabilitas, kualitas audit, kepemimpinan, dan akuntabilitas. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Perusahaan diuntungkan dan dirugikan akibat ikatan politik. Ikatan politik telah terbukti memberikan perlakuan menguntungkan dan kemudahan dalam beberapa pendekatan yang berbeda, seperti penerimaan subsidi, pengadaan dan kebijakan publik, subsidi dan pajak (Tian & Cheung, 2013), kemudahan akses IPO perusahaan (Francis et al., 2009), kinerja dan nilai tambah dari organisasi mitra politik (Tian & Cheung, 2013; Wati, 2017). Namun, selain hasil yang positif, hubungan politik juga berdampak buruk pada organisasi, khususnya pengaruh tinggi yang menyebabkan *overinvestment*, berkurangnya harga dan pengembalian saham (Fan et al., 2007), berkurangnya kinerja (Leuz & Oberholzerge, 2006), dan laporan keuangan berkualitas rendah (Al-dhamari & Ismail, 2015; Chaney et al., 2011; Habib et al., 2018; Wati et al., 2020).

Menurut temuan studi Wati et al. (2020) yang dilakukan pada perusahaan yang terhubung secara politik menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terhubung secara politik. Manajemen akan sering mengawasi pendapatan untuk menyembunyikan biaya yang dikeluarkan untuk asosiasi ini. mengutip sejumlah penelitian sebelumnya, 2020, Wati et al. (2020) memberikan bukti tambahan bahwa bisnis yang terhubung secara politik menggunakan pengawasan yang tidak efektif untuk menyembunyikan upaya penipuan dengan menerbitkan laporan keuangan yang buruk (Al-dhamari & Ismail, 2015; Habib et al., 2018), dan bisnis yang terhubung secara politik sering kali memiliki data keuangan yang ambigu, yang memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan (Chi et al., 2019). Namun demikian, Batta et al. (2014) menunjukkan hasil yang beragam di mana laporan

anggaran dari organisasi yang terkait secara politik lebih unggul daripada ringkasan fiskal dari organisasi yang tidak terafiliasi.

Orang-orang yang dekat dengan pemerintah seringkali tergabung pada struktur organisasi sebuah perusahaan di Indonesia, baik sebagai komisaris maupun direksi. Pranoto dan Widagdo (2016) mengungkapkan bahwa tindakan pelimpahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki hubungan politik dengan otoritas publik telah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam rentang waktu yang sangat signifikan, tepatnya sejak 2004 hingga 2014. Ikatan politik masih terlihat jelas di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo, salah satunya penunjukan pengangkatan anggota BUMN dari partai politik atau sukarela menjadi anggota BUMN. Presiden Joko Widodo mengambil alih kursi kepresidenan pada 2014. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan ratusan pejabat negara menduduki jabatan komisaris BUMN. Hingga tahun 2017, sekitar 125 otoritas dari beberapa organisasi berdiri kokoh di pijakan hakim BUMN. Apalagi pada tahun 2019, jumlah orang BUMN paruh waktu sebanyak 397 orang. Badan-badan di mana pegawai negeri memegang jabatan rangkap berbeda-beda.

Laporan keuangan dengan kualitas lebih baik memungkinkan organisasi dengan dana terbatas untuk menarik modal lebih baik, dengan membuat aktivitas investasi mereka lebih jelas, dan mengurangi pilihan yang tidak menguntungkan dalam memberikan perlindungan. Selain itu, sifat pengungkapan moneter yang lebih tinggi dapat mengurangi motivasi administrasi untuk berkontribusi secara tidak perlu dan meningkatkan kapasitas pendukung keuangan untuk menyaring kegiatan spekulasi administratif (Habib et al., 2022). Perusahaan yang banyak mengungkapkan *corporate social responsibility* perusahaan (CSR) memproyeksikan citra positif diri mereka kepada investor dan pemangku kepentingan. Kebutuhan suatu bisnis untuk membangun hubungan yang seimbang dan berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi secara teoritis didukung oleh CSR.

Sesuai dengan, Fallah Shayan et al. (2022) Dalam rangka memenuhi *corporate social responsibility*, pada tahun 2020 yang sebelumnya dipandang sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh bisnis untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan, telah berkembang menjadi isu strategis di dewan direksi (BOD) agenda dan telah direncanakan dan didiskusikan di tingkat manajemen puncak. bisnis. Secara teoritis, *corporate social responsibility* dapat didefinisikan sebagai kewajiban moral perusahaan kepada pemangku kepentingannya, terutama masyarakat atau individu di wilayah kerja dan operasinya. Moralitas harus ditegakkan oleh bisnis. Batas kemakmuran organisasi menurut perspektif CSR berfokus pada standar moral dan moral, untuk lebih spesifik mencapai hasil terbaik tanpa merugikan pertemuan lokal lainnya (Spence, 2016).

Tujuan pengungkapan CSR perusahaan adalah untuk memberikan informasi tentang implementasi dan kinerja CSR perusahaan dalam kaitannya dengan keberlanjutan, yang dianggap dapat menggambarkan prospek masa depan yang menjanjikan. Manajemen bebas memutuskan berapa banyak informasi yang akan diungkapkan karena pengungkapan bersifat sukarela.

Tujuan publikasi informasi ini adalah untuk menarik investor dan mengurangi dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Semakin banyak data yang diungkapkan, semakin mudah dan relevan pengumuman moneter dianggap disampaikan kepada kepala. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mengurangi konflik antara agen dan prinsipal. Dengan pengungkapan CSR yang lebih luas, itu akan ditangkap sebagai tanda positif oleh klien pengungkapan moneter dan kemudian akan dijawab dengan memperluas biaya saham organisasi.

Karena kurangnya pemahaman CSR, banyak kasus kerusakan lingkungan dan kesejahteraan sosial telah terjadi. Ambil contoh PT Lapindo Brantas dan PT Freeport Indonesia. Dalam menjalankan bisnis pertambangannya, PT Freeport Indonesia justru merusak lingkungan. Danau Wanagon, yang gagal tiga kali, merupakan salah satu kerusakan terparah. Pembuangan sampah yang sembarangan dengan kapasitas yang besar menjadi penyebabnya. PT Lapindo Brantas menjadi sumber kasus populer lainnya. Lebih dari 800 hektar kawasan pemukiman terendam akibat proyek pengeboran tersebut, yang menyebabkan aliran lumpur panas terus meluap dari dalam lapisan bumi yang dalam. Dua contoh di atas menunjukkan bagaimana tindakan perusahaan secara signifikan merugikan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, otoritas publik dan organisasi harus meningkatkan Kewajiban Sosial Perusahaan untuk menghindari kejadian serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik utama dari laporan ini adalah representasi yang akurat dan tidak adanya kesalahan material yang dapat menyesatkan pengguna laporan. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keuangan suatu perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Investor banyak menggunakan laporan keuangan karena dapat membantu mereka membuat keputusan tentang investasi. Dengan demikian, laporan moneter memiliki kemampuan penting sebagai sumber data tentang pelaksanaan organisasi. Laporan keuangan juga merupakan kewajiban dewan dalam penggunaan aset yang dibagikan kepada mereka.

Pergerakan aset perusahaan, jumlah kewajiban yang masih harus dibayar, jumlah saham yang beredar, dan seluruh kegiatan operasional perusahaan semuanya dapat diamati melalui laporan keuangan. Laporan keuangan perlu menyediakan informasi berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan agar bermanfaat bagi pengguna. Tujuan keseluruhan dari data yang diperkenalkan dalam laporan moneter adalah untuk memenuhi kebutuhan data semua pertemuan ringkasan anggaran klien. Laporan keuangan untuk bisnis di Indonesia harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut SAK per 1 Juli 2017, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik:

1) **Understandability/mudah dipahami**

Kemajuan laporan keuangan bergantung pada kemampuan klien untuk memahami data tanpa masalah. Klien diharapkan memiliki informasi yang memuaskan tentang masalah keuangan dan bisnis, pembukuan, dan keinginan untuk berkonsentrasi pada data dengan ketekunan yang masuk akal. Namun, data kompleks yang harus disertakan dalam laporan keuangan tidak boleh diabaikan begitu saja karena beberapa pengguna merasa terlalu sulit untuk memahaminya.

2) **Relevan**

Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan agar bermanfaat. Kemampuan laporan keuangan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta untuk mengkonfirmasi atau meningkatkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pengguna, adalah yang membuat laporan keuangan berhasil memberikan informasi yang relevan.

3) **Realibility**

Informasi yang disajikan harus dapat dipercaya untuk menjamin kegunaan laporan keuangan. Informasi dianggap andal jika tidak mengandung kesalahan yang signifikan, salah tafsir, atau interpretasi yang menyesatkan, dan jika pengguna dapat mengandalkannya sebagai representasi kondisi yang benar dan akurat yang seharusnya disajikan secara wajar. Menurut laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara obyektif kondisi atau kejadian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dimanipulasi sangat penting untuk kualitas keandalannya.

4) **Comparability**

Dengan adanya informasi yang disajikan, suatu laporan keuangan dapat diperbandingkan sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antar perusahaan atau periode waktu. Karena pihak yang berkepentingan sangat bergantung pada laporan keuangan, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa laporan tersebut akan tersedia tepat waktu. Sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan bebas bias digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan.

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah suatu kondisi dimana dalam suatu organisasi, otoritas negara atau otoritas negara dan individu dari kelompok ideologi memiliki asosiasi atau situasi simultan sebagai pelopor organisasi atau investor utama organisasi (Faccio, 2006). Perusahaan yang mengadopsi strategi non-pasar selain strategi pasar untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam melawan persaingan yang ketat pada dunia bisnis mengakibatkan terbentuknya koneksi politik. Sesuai (Goldman et al., 2009) asosiasi politik dapat dianggap sebagai jenis usaha yang lemah, karena biaya organisasi akan meningkat sehingga merugikan kepentingan publik, dan organisasi yang terkait secara politik akan menghargai keuntungan moneter yang luar biasa.

Dengan demikian, organisasi tipikal mendapat manfaat dari asosiasi politik yang kemudian memberikan sedikit pertimbangan pada masalah administrasi perusahaan dan sifat data yang dibuat oleh organisasi. Namun jika diukur dengan akruar, hal ini akan menghasilkan kualitas laba yang lebih rendah (Chaney et al., 2011). Wati et al. (2020) mencirikan koneksi politik jika satu pemilik adalah investor dengan setidaknya 10% kepemilikan, pimpinan perusahaan seperti dewan direksi maupun dewan komisaris (two tier system) sebagai anggota atau mantan anggota parlemen (DPR RI, DPD RI), sebagai pemegang kekuasaan atau pejabat negara sebelumnya termasuk jabatan pimpinan (kementerian negara, lembaga pemerintah non departemen, dan asosiasi pemerintah pusat lainnya), Lembaga yudikatif dan legislatif, pimpinan partai politik tanpa henti yang memiliki hubungan dekat dengan otoritas negara.

Corporate Social Responsibility

The World Business Committee for Practical Turn of events (WBCSD) mencirikan CSR sebagai kewajiban berkelanjutan organisasi untuk bertindak secara moral, dan bekerja untuk kepuasan pribadi dan keluarga mereka, jaringan dan masyarakat pada umumnya. Menurut penulis bisnis John Elkington, fokus CSR perusahaan adalah *Triple Bottom Line*, juga dikenal sebagai 3P - *Profit, Planet, dan People*. Ini berarti bahwa organisasi pada umumnya tidak hanya berpusat pada bagaimana menghasilkan *profit*, tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut dapat memberi dampak positif kepada lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Oleh karena itu, CSR adalah program kepedulian perusahaan yang menyeimbangkan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Menerapkan CSR dengan cara yang sederhana antara lain dengan mendistribusikan sampah dengan cara yang tidak mencemari lingkungan dan hemat listrik. Pelaksanaan program kerja tertentu perusahaan dapat mendukung CSR perusahaan. Program kerja dapat diimplementasikan dalam sembilan cara berbeda, antara lain: *employee programs; community and broader society; environment programs; reporting and communications programs; governance or code conduct programs; stakeholder engagement programs; supplier programs; customer/product stewardship programs; dan shareholder programs.*

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dalam keadaan sehat, dan merupakan pemangku kepentingan dalam CSR. Konsekuensinya, dalam CSR, pemerintah berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan mitra bisnis. Para ahli publik tidak bertindak sebagai pihak yang mengontrol asosiasi, melainkan sebagai pihak yang membuat metodologi untuk pelaksanaan Komitmen Sosial Perusahaan. Tragisnya, hukum di Indonesia yang mengatur implementasi OMS masih sangat lemah. Karena tidak ada aturan yang mengikat secara hukum, banyak kerugian.

Teori Agensi

Perusahaan menerapkan praktik bisnis mereka berdasarkan teori keagenan. Penilaian ini didukung oleh Jensen, M. dan William, H. (1976) yang menganggap bahwa hipotesis jabatan disebut juga hipotesis yang mengikat secara hukum yang memandang organisasi sebagai pemahaman otoritatif antar individu organisasi. Hal ini memberi kuasa kepada salah satu pihak (pemimpin) untuk membuat perjanjian, baik secara sah maupun tegas dengan pihak lain (ahli) dengan harapan agar ahli menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan. Salah satu penyebab perjuangan organisasi adalah adanya *asymmetric information*.

Isu informasi yang tidak seimbang yang diberikan oleh agen mengakibatkan informasi yang asimetris. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi pertama, diikuti oleh *moral hazard*. Menurut teori keagenan, pemilik dan manajemen bisnis akan selalu berbeda pendapat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. Perselisihan terjadi ketika level tertinggi organisasi, seperti kepala dan kepala, adalah legislator atau orang-orang yang termasuk dalam kelas yang terkait secara politik. Mereka mengambil pendekatan atau pilihan dengan tujuan membantu individu atau mengumpulkan minat.

Teori Stakeholder

Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya harus beroperasi untuk keuntungannya sendiri tetapi juga melayani kepentingan pemangku kepentingannya. Untuk pertama kalinya pada tahun 1984, Freeman mengusulkan gagasan pemangku kepentingan untuk menjelaskan perilaku perusahaan dan kinerja social (Borghei-Ghomi & Leung, 2013). Nguyen et al. (2021) mengusulkan bahwa premis hipotesis pendapatan adalah bahwa perusahaan harus menyelesaikan tanggung jawab mereka tidak hanya untuk investor tetapi juga untuk bagian lain dari masyarakat karena mereka telah tumbuh begitu besar dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Menurut *stakeholder theory*, ada hubungan antara individu, kelompok, dan bisnis yang dapat saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh mereka. Freeman (1984), pemangku kepentingan memandang bisnis sebagai sarana untuk membangun hubungan di antara sejumlah kelompok yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang menghasilkan bisnis. Organisasi diharapkan memiliki opsi untuk mengejar dua tujuan. Yang mendasar adalah menghasilkan bayaran, dan yang berikutnya adalah menjaga hubungan baik dengan iklim dan mitra yang diandalkannya.

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah pekerjaan peneliti, diperlukan suatu metode dalam suatu penelitian. Strategi diperlukan untuk memiliki pilihan untuk dengan susah payah melihat objek penelitian. Sementara itu, pengertian teknik eksplorasi adalah metode yang logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan yang jelas (Sugiyono, 2019). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafis subyektif, artinya informasi yang dibedah dan konsekuensi

pemeriksaannya adalah sebagai penggambaran kekhasan, bukan dalam kerangka berpikir angka atau koefisien tentang hubungan antar faktor.

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan angka. Menurut Kriyantono (2014) menyatakan deskriptif kualitatif adalah metode yang mencoba menemukan makna yang lebih dalam atau lebih dalam dari data dengan cara mendeskripsikannya secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode menarik ini bermacam-macam informasi yang dapat menggambarkan apa yang terjadi dan kondisi. Dengan mencerahkan, kajian ini mencoba memotret dari atas ke bawah siklus dan sistem yang dianut

Investigasi menarik tentang keanehan sosial dengan menghasilkan ide tetapi tidak berspekulasi adalah bagian dari pengujian unit. Dalam komunitas riset, analisis perlu mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan faktor, efek samping, atau kondisi. Melalui eksplorasi yang menarik, alasan penelitian ini adalah untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap jaminan permata pemerasan dalam membedakan ringkasan anggaran palsu. Jenis informasi ujian yang dikumpulkan melalui penelitian literatur meliputi informasi opsional seperti hipotesis, informasi penelitian, atau temuan dari eksplorasi sebelumnya dengan berbagai sumber terkait dengan subjek yang sedang dipertimbangkan.

Tiga tahapan analisis berikut ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif setelah pengumpulan data (Bungin, 2017) :

- a. Reduksi
Para peneliti mengamati data untuk mencari informasi yang relevan dan menghapus data yang tidak mendukung penelitian ini.
- b. Penyajian
Setelah mengurangi data yang diperoleh, informasi tersebut disusun dalam bentuk deskripsi, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur, atau bentuk visual lainnya untuk mempermudah analisis dan pemahaman.
- c. Menarik Kesimpulan
Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari analisis data sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Proses analisis ini melibatkan pengembangan gagasan dan pemahaman peneliti yang dihasilkan secara induktif, dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koneksi Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mengingat hasil uji dari penelitian (Al-dhamari & Ismail, 2015; Chaney et al., 2011; Habib et al., 2018; Leuz & Oberholzerge, 2006; Wati, 2017; Wati et al., 2020). Sebagai hasil dari akrual diskresi yang lebih tinggi dalam bisnis yang terhubung secara politik mengindikasikan laporan keuangan yang buruk, temuan ini menjelaskan bahwa semakin tinggi koneksi politik didalam perusahaan, semakin rendah kualitas laporan keuangannya. Temuan penelitian ini memberikan kepercayaan pada teori keagenan, yang memprediksi bahwa pemilik dan manajemen bisnis akan terlibat dalam perselisihan.

Perselisihan terjadi ketika level tertinggi organisasi, seperti komisaris dan direksi, adalah individu yang termasuk dalam klasifikasi terkait politik. Mereka membuat keputusan atau kebijakan dengan maksud memajukan kepentingan mereka sendiri atau kelompok mereka. Mereka mendapatkan keuntungan dalam beberapa hal, salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan dengan harapan investor tetap tertarik dengan bisnis mereka dan berinvestasi di dalamnya. Sementara itu, hal tersebut menyebabkan investor menggunakan laporan keuangan yang telah dimanipulasi tersebut untuk mengambil keputusan investasi. Investor dan manajemen harus saling timbal balik, dengan investor berinvestasi di perusahaan dan perusahaan menyampaikan laporan yang sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku. Hasil dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa ada dampak negatif dari asosiasi politik pada sifat laporan keuangan yang menggunakan proksi DAC.

Corporate social responsibility Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sejumlah penelitian, antara lain oleh Aziz dan Faisol (2018), Wijaya dan Juniarti (2016), Fauziah dan Marissan (2014), Candrayanthi dan Saputra (2013), Laksmana dan Yang (2009) serta Maignan dan Ferrell (2004) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dalam bisnis. Ketika sebuah organisasi melaksanakan CSR, itu menunjukkan bahwa itu responsif secara sosial dan siap untuk menarik perhatian mitra, yang pasti akan membantu meningkatkan laba dan akan terus menghasilkan keuntungan. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang melakukan CSR mampu menjaga nama baik atau reputasinya di mata stakeholders sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, organisasi yang menyelesaikan CSR akan memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan organisasi lain yang tidak melakukannya.

Sebagai bentuk penerapan *stakeholder theory*, banyak bisnis yang mendapatkan insentif untuk melaksanakan CSR. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan dapat memperoleh manfaat jangka panjang jika lebih memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingannya. Salah satu keuntungan melaksanakan CSR adalah mengusahakan berdirinya organisasi. Keinginan pelanggan untuk membeli produk perusahaan dapat meningkat sebagai hasilnya, yang mengarah pada peningkatan penjualan dan penguatan reputasi merek. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan suatu bisnis adalah peningkatan penjualan. Kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dapat meningkat sebagai hasilnya.

SIMPULAN

Menurut temuan kajian literatur, koneksi politik berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan *corporate social responsibility* meningkatkan kualitas laporan keuangan. menunjukkan laporan keuangan yang buruk dengan peningkatan akrual diskresioner dalam bisnis yang terhubung

secara politik. Kualitas pelaporan keuangan perusahaan meningkat ketika pengungkapan berdasarkan GRI 4 digunakan untuk mengukur *corporate social responsibility* perusahaan. Hasil ini juga sejalan dengan *stakeholder theory*, yang memprediksi bahwa bisnis yang menunjukkan dan mengungkapkan *corporate social responsibility* akan mendapat manfaat dari peningkatan dukungan publik dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi asosiasi politik di dalam suatu organisasi, semakin sedikit sifat laporan keuangan yang dibuat. Semakin baik kewajiban sosial perusahaan diselesaikan dalam organisasi, semakin tinggi kualitas laporan keuangan dalam organisasi dan akan meningkatkan citra organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-dhamari, R., & Ismail, K. N. I. K. (2015). Cash holding, political connection and earning quality. *International Journal of Managerial Finance*, 11(2), 215–231.
- Aziz, A. J., & Faisol, D. A. (2018). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KUALITAS LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SELAIN INDUSTRI KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI). *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i1.1384>
- Batta, G., Sucre Heredia, R., & Weidenmier, M. (2014). Political Connections and Accounting Quality under High Expropriation Risk. *European Accounting Review*, 23(4), 485–517. <https://doi.org/10.1080/09638180.2014.906316>
- Borghei-Ghomi, Z., & Leung, P. (2013). An Empirical Analysis of the Determinants of Greenhouse Gas Voluntary Disclosure in Australia. *Sciedu Press*, 2(1).
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo.
- Candrayanthi, A. A. A., & Saputra, I. D. G. D. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.1 ISSN: 2302-8556, 4(1), 141–158.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Chi, H.-Y., Weng, T.-C., Chen, G.-Z., & Chen, S.-P. (2019). Do Political Connections Affect the Conservative Financial Reporting of Family Firms? *Sustainability*, 11(20), 5563. <https://doi.org/10.3390/su11205563>
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fallah Shayan, N., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). *Sustainability*, 14(3), 1222. <https://doi.org/10.3390/su14031222>
- FAN, J., WONG, T., & ZHANG, T. (2007). Politically connected CEOs, corporate governance, and Post-IPO performance of China's newly partially

- privatized firms☆. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 330–357. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.008>
- Fauziah, F. E., & Marissan, I. (2014). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 11(1), 38–60.
- Francis, B. B., Hasan, I., & Sun, X. (2009). Political connections and the process of going public: Evidence from China. *Journal of International Money and Finance*, 28(4), 696–719. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2009.01.002>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? *Review of Financial Studies*, 22(6), 2331–2360. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088>
- Habib, A., Ranasinghe, D., Muhammadiyah, A. H., & Islam, A. (2018). Political connections, financial reporting and auditing: Survey of the empirical literature. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 31, 37–51. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.05.002>
- Habib, A., Ranasinghe, D., Wu, J. Y., Biswas, P. K., & Ahmad, F. (2022). Real earnings management: A review of the international literature. *Accounting & Finance*, 62(4), 4279–4344. <https://doi.org/10.1111/acfi.12968>
- Jensen, M., C., & William, H., M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305–360.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenadamedia Group.
- Laksmiana, I., & Yang, Y., W. (2009). Corporate Citizenship and Earning Attributes. *Advance in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 25, 40–48.
- Leuz, C., & Oberholzerge, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 411–439. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006>
- Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/0092070303258971>
- Nguyen, N. T. T., Nguyen, N. P., & Thanh Hoai, T. (2021). Ethical leadership, corporate social responsibility, firm reputation, and firm performance: A serial mediation model. *Heliyon*, 7(4), e06809. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06809>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Agressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), 472–486.
- Spence, L. J. (2016). Small Business Social Responsibility. *Business & Society*, 55(1), 23–55. <https://doi.org/10.1177/0007650314523256>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Tian, L., & Cheung, W. (2013). Controlling Shareholders and. *Political Connections*,

1-43.

- Wati, L. N. (2017). Board of commissioner's effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(November), 255-270.
- Wati, L. N., Ramdany, R., & Momon, M. (2020). Does corporate governance affect financial reporting quality of politically connected firms? *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(3), 2126-2143. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3\(45\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(45))
- Wijaya, L. I., & Juniarti. (2016). Pengaruh Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Barang Konsumsi Dengan Sub Sektor Rokok, Makanan dan Minuman di Indonesia. *Business Accounting Review*, 4(1), 217-228.
- Utomo, E. N., Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2020). Analisis faktor non keuangan dan keuangan terhadap kualitas laba laporan keuangan. *AKUNTABEL*, 17(2), 231-240.
- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Utomo, E. N. (2020, December). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 2020).
- Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Asimetri Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Pendekatan Relevansi Nilai. *Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 1.
- Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2019). PENDEKATAN INDEKS ECKEL DALAM PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *INDONESIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE*, 3(1), 56-81.
- Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(2), 229-240.